

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Abrasi Pantai di Kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari indikator dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan hasil kolaborasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka antar aktor yang terlibat dalam penanganan abrasi pantai telah dilakukan melalui berbagai forum koordinasi, rapat, sosialisasi lingkungan, dan kegiatan lapangan. Akan tetapi, intensitas pertemuan masih bersifat situasional dan belum dilaksanakan secara rutin serta terstruktur. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih terbatas sehingga proses komunikasi kolaboratif belum berjalan optimal.

2. Membangun Kepercayaan

Kepercayaan antar aktor mulai terbentuk melalui komunikasi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan bersama dalam beberapa kegiatan lingkungan. Masing-masing pihak telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dalam penanganan abrasi. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan dalam transparansi informasi dan kejelasan pembagian peran

antar lembaga, sehingga kepercayaan yang terbentuk belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan.

3. Komitmen Pada Proses

Komitmen para pihak dalam menangani abrasi sudah terlihat melalui berbagai kegiatan lingkungan dari adanya kesepakatan untuk melakukan berbagai upaya penanganan abrasi, seperti rehabilitasi mangrove, kegiatan pelestarian lingkungan pesisir dan koordinasi antar instansi. Namun, komitmen tersebut belum didukung oleh program terpadu jangka panjang maupun regulasi kerja sama yang jelas menjadi hambatan dalam memperkuat komitmen kolaboratif. Akibatnya, pelaksanaan program masih bersifat insidental dan belum menunjukkan keberlanjutan yang konsisten.

4. Pemahaman Bersama

Para aktor pada umumnya memiliki pemahaman yang sama bahwa abrasi pantai merupakan permasalahan serius yang mengancam lingkungan pesisir, aktivitas pelabuhan, pemukiman masyarakat dan kegiatan ekonomi yang harus ditangani secara bersama-sama.

Selain itu, terdapat kesamaan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan mengurangi dampak abrasi terhadap masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai prioritas penanganan, pembagian tanggung jawab, serta strategi yang perlu dilakukan sehingga pemahaman bersama belum sepenuhnya terintegrasi.

5. Hasil Kolaborasi

Hasil kolaborasi telah terlihat melalui berbagai kegiatan seperti rehabilitasi dan penanaman mangrove, gotong royong kebersihan pantai, edukasi lingkungan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi pesisir. Meskipun demikian, dampak yang dirasakan terhadap pengurangan abrasi pantai masih belum signifikan karena abrasi masih terus terjadi. Dengan demikian, hasil kolaborasi sudah mulai terlihat, tetapi efektivitasnya dalam mengatasi abrasi pantai di kawasan Pulau Baai masih perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah perlu membentuk forum kolaborasi atau tim koordinasi khusus yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan abrasi pantai di kawasan Pulau Baai. Forum tersebut perlu dilaksanakan secara rutin agar komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

2. Bagi PT Pelindo (Persero) Cabang Bengkulu

PT Pelindo perlu meningkatkan keterlibatan dan komitmen dalam program penanganan abrasi melalui dukungan sumber daya, pendanaan, serta pelaksanaan program lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dengan

instansi pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan pesisir.

3. Bagi Masyarakat dan Organisasi Lingkungan

Masyarakat perlu terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan pesisir, seperti penanaman mangrove, pemeliharaan kawasan pantai, dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memperparah abrasi. Organisasi lingkungan juga diharapkan dapat memperkuat edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar kesadaran lingkungan semakin meningkat.

4. Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan

Seluruh pihak perlu menyusun program penanganan abrasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kerja sama lintas sektor. Program tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan rehabilitasi mangrove, tetapi juga mencakup perencanaan teknis, monitoring, evaluasi berkala, serta penyusunan kesepakatan bersama yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tata kelola kolaboratif dalam penanganan abrasi pantai dengan menggunakan perspektif atau teori lain dengan cakupan yang lebih luas, termasuk analisis kebijakan, efektivitas program mitigasi, serta model kolaborasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir.